

Research Article

Noktah Merah di Serambi Mekah (Koflik Aceh dalam Tanah Surga Merah)

Muh. Fatoni Rohman², Alpi Anwar Pulungan²

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Brawijaya¹²

muh_fatoni@ub.ac.id¹, alpi.anwar.2102118@students.um.ac.id²

Informasi Artikel	ABSTRACT
Submit: 13– 08 – 2023 Diterima: 13 – 09 – 2023 Dipublikasikan: 20 – 10 – 2023	Literature should not only serve as a form of entertainment and a tool for individual contemplation. Literature should also be capable of sparking creative critical movements, especially in response to the current social conditions. The history of Indonesia is filled with various social conflicts, both horizontal and vertical in nature. One of these conflicts is explored by Arafat Nur in the novel "Tanah Surga Merah" (TSM). TSM is a novel that takes the Aceh conflict as its creative inspiration. Arafat Nur captures the blossoming of conflicts in Aceh before and after the Helsinki Agreement, a peace agreement signed by conflicting parties in Aceh in 2005 in Helsinki, Finland. TSM is descriptively analyzed to uncover data related to the Aceh conflict and its surrounding circumstances. Based on this study, several findings are identified: (1) the Aceh conflict is not a conflict rooted in a single cause and is not mono-perspective, (2) in the context of reconciliation, the data in the novel that has been analyzed can serve as a narrative bridge for the conflict, as it provides narratives from various conflicting parties. Keywords: conflict, reconciliation, sociological literature
Penerbit	ABSTRAK
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Universitas Insan Budi Utomo, Malang, Indonesia.	Sastra seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan dan alat kontemplasi individu saja. Sastra juga harus mampu memantik pergerakan kritis kreatif, terutama guna menyikapi kondisi sosial masyarakat hari ini. Sejarah bangsa Indonesia dipenuhi dengan beragam konflik-konflik sosial, baik berupa konflik horizontal maupun konflik vertikal. Satu di antara konflik tersebut diangkat oleh Arafat Nur dalam novel Tanah Surga Merah (TSM). Novel TSM merupakan novel yang menjadikan konflik Aceh sebagai ide pengkaryaan. Arafat Nur memotret bunga-bunga konflik di Aceh sebelum dan sesudah perjanjian Helsinki. Sebuah perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkonflik di Aceh pada tahun 2005 di Helsinki Finlandia. Novel TSM secara deskriptif dianalisis guna menemukan data-data terkait konflik Aceh dengan segala situasi yang melingkupinya. Berdasarkan Kajian tersebut ditemukan beberapa temuan kajian yaitu (1) konflik Aceh bukanlah merupakan konflik yang dilatarbelakangi banyak hal dan bukan konflik mono perspektif, (2) Dalam konteks rekonsiliasi, data dalam novel yang telah dikaji dapat dijadikan sebagai jembatan

narasi konflik, karena menyediakan narasi-narasi dari beragam pihak yang berseteru.

Kata Kunci: konflik, rekonsiliasi, sosial budaya.

PENDAHULUAN

Sastra, selain sebagai karya tulis manusia yang indah (*belles letter*), memiliki fungsi sebagai *dulce et utile* sebagai mana diungkapkan oleh Horatio/Horace (Teeuw, 2017:51; Welleck dan Warren, 1989: 25) atau *susastra* dalam konsep Jawa dan Melayu Kuno (Teeuw, 2017:23; Zoetmulder, 2011:1052). Horatio mendadarkan konsepsi bahwa sastra harus bisa memberikan dua fungsi yaitu mendidik dan menghibur. Dua fungsi tersebut meletakkan sastra sebagai media edukasi sosial, yang pemaknaannya sangat terbatas. Salah satu keterbatasan pengertian tersebut adalah apabila mendudukan fungsi sastra dalam konstelasi konflik.

Ragam pengertian sastra yang hanya “bertumpu pada keindahan fisik” tentu tidak akan cukup berperan sebagai pereda konflik di masyarakat. Apalagi jika hanya menjadikan sastra sebagai bacaan penghibur dan alat kontemplasi individual. Seharusnya sastra juga mampu membuat masyarakat bergerak menjadi lebih baik, baik secara individu maupun memupuk kesadaran bermasyarakat. Fungsi pergerakan ini disebutkan oleh Teeuw (2017:51) dengan istilah “*movere*”.

Sastra adalah produk masyarakat, dan pengarang merupakan anggota masyarakat. Hal tersebut menjadikan relasi antara pengarang dengan kehidupan masyarakat, latar belakang unsur sosial dan sejarah tidak dapat dihindarkan. Hal ini tidak lepas dari kedudukan sastrawan yang merupakan bagian dari masyarakat (Jdanov dalam Eskarpit, 2008:8; Junus (b)1986:2). Horatio menyatakan bahwa tugas utama sastrawan adalah sebagai penyampai *docere* dan *delectere* (dalam Teeuw, 2017:51). Implementasi fungsi sastra dalam masyarakat, tentu sangat terkait dengan bagaimana seniman, sebagai anggota masyarakat, menyadarkan masyarakat tentang konsep hidup bermasyarakat.

Selain secara eksternal seperti yang telah disampaikan, fungsi sastra secara internal adalah media yang digunakan untuk mengungkapkan ekspresi seorang sastrawan. Ekspresi tersebut bisa berupa pendapat, imajinasi, atau ungkapan terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan pengarang. Dengan fungsi *dulce at utile* dan *movere* seharusnya sastra mampu berperan dalam upaya pemecahan konflik. Peran tersebut sangat terbuka, karena sastra mampu menjadi “jembatan antara” pihak yang terlibat dalam konflik. Jembatan yang mampu menghubungkan narasi pelaku konflik.

Relasi triangular antara sastra-masyarakat-konflik tergambar nyata dalam berapa karya penulis Indonesia. Satu di antaranya yang akan dijadikan obyek materi dalam tulisan ini yaitu novel yang berjudul: *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur. Pemilihan karya tersebut berdasar pada ragam konflik yang diangkat sebagai dasar penulisan novel tersebut yaitu konflik horizontal antar masyarakat, dan konflik vertikal antara negara dengan masyarakat.

Konflik adalah perseteruan pelanggar dan korban dikarenakan pelanggaran aturan atau norman yang berlaku. Setiap konflik harus dicari jalan keluar supaya tidak menjadi lingkaran kekerasan yang tidak pernah putus. Penyelesaian konflik ini biasa disebut dengan resolusi konflik. Alif (2015:260) menyebutkan bahwa tahapan awal sebuah resolusi konflik adalah penghentian konflik dan penemuan kesepakatan dan kesepahaman antar pelaku. Salah satu bentuk kesepakatan tersebut adalah *mendudukan* kembali posisi pelaku konflik guna menemukan kesepahaman dan titik temu konflik. Kesepahaman tersebut akan mengurangi intensitas pertentangan kepentingan para pelaku.

Kesepakatan sebagai resolusi konflik akan terjadi ketika masing-masing pihak menyadari perlunya mekanisme guna mengakhiri konflik, meskipun tidak mengakhiri konflik secara penuh. Hal ini dikarenakan perubahan orientasi hubungan tidak secara otomatis akan diikuti oleh perubahan-perubahan di level struktur keyakinan kedua belah pihak (alif, 2015:262). Di

antara sekian banyak jenis resolusi konflik, salah satu jenis resolusi konflik yang dianggap berhasil menyelesaikan masalah konflik horizontal berskala besar adalah rekonsiliasi.

Rekonsiliasi adalah salah satu cara penyelesaian konflik yang dimulai di Afrika Selatan pada tahun 1990. Konsep rekonsiliasi ini berjalan efektif setelah Afrika Selatan mengadakan pemilihan umum yang demokratis pada tanggal 27 April 1994. Dilihat dari sudut pandang psikologis rekonsiliasi merupakan peristiwa interpersonal yang membutuhkan komitmen kedua belah pihak (korban dan pelanggar) untuk menghentikan konflik dengan melakukan pemaafan dan memperbaiki hubungan yang harmonis (Verdoleagee, 2008:1; Afif 2015:229-230). Jones (2006:377) menyederhanakan konsep dan tujuan rekonsiliasi itu dengan menyatakan bahwa rekonsiliasi adalah cara untuk memperbaiki hubungan sosial dan perdamaian daripada menuntut retribusi kepada pelanggar (*offenders*).

Keberhasilan sebuah rekonsiliasi dapat ditempuh apabila terdapat kesepakatan dalam penyelesaian konflik dan membangun hubungan baru yang lebih damai. Kelman (dalam Alif, 2015: 236) menyatakan bahwa keberhasilan itu ditentukan oleh kemampuan kedua belah pihak dalam memanfaatkan sumber daya psikologis, potensi dalam hubungan, serta sistem nilai yang berlaku di antara mereka. Kelman juga menjelaskan proses rekonsiliasi dianggap berhasil apabila terjadi tiga proses utama, yaitu: (1) Kesukarelaan; (2) Identifikasi; dan (3) Internalisasi. Todung Mulya Lubis (20 Nov 2014) menyatakan bahwa proses rekonsiliasi memerlukan tiga tahapan yang harus dilakukan oleh pihak yang berkonflik, yaitu: (1) Pengungkapan kebenaran; (2) Pemaafan; dan (3) Penyembuhan.

Abrams (dalam Teeuw, 2017:49) mengungkapkan bahwa penelitian sastra berperspektif sosiologi sastra dilakukan dengan menggunakan tiga perspektif yaitu pengarang, karya, dan pembaca. Pernyataan tentang hubungan antara pengarang dengan alam atau lingkungan sekitarnya tersebut sudah lama muncul. Istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan hubungan tersebut adalah mimetik. Mimetik berasal dari bahasa Yunani *mimesis* yang berarti tiruan. Istilah ini digunakan oleh Plato dan Aristoteles untuk menjelaskan hubungan antara karya seni dan realita (Teeuw, 2017:219; Luxemburg, 1989:15). Teori ini menyatakan bahwa sastra merupakan imitasi dari alam. Abrams (dalam Teeuw, 2017: 50) Mimetik adalah pendekatan sastra yang lebih menitik beratkan kepada semesta (*Universe*), Pendekatan yang menitik beratkan pada pencipta sastra (*artis*) disebut pendekatan ekspresif, pendekatan yang menitikberatkan pada pembaca (*audience*) adalah pendekatan reseptif.

Hubungan antara alam dan karya sastra juga diungkapkan oleh Junus (1985:3) yang menyatakan bahwa sastra (imajinasi) tidak bisa dipisahkan dengan realitas (peristiwa). Junus (1985:4-5) menyatakan bahwa peristiwa yang menjadi dasar penciptaan suatu karya sastra tidak berarti peristiwa nyata dengan pelakunya yang kongkret. Namun bisa juga berhubungan dengan suatu peristiwa yang lebih umum karena banyak orang yang terlibat dalam peristiwa itu.

Pengkajian karya sastra dengan pendekatan sosiologi sastra mengharuskan kehadiran relasi antara sastra dengan masyarakat sebagai agen pembentuknya. Karya sastra, dalam wacana relasional tersebut, merupakan produk dialogis sastrawan dengan dunia di sekitarnya. Berdasar hal tersebut, penelitian ini mencoba untuk menggali keterkaitan sastra dengan realitas, sebagai pijakan awal pengkajian.

Secara formal tujuan tulisan ini adalah untuk mencari jejak-jejak kebermanfaatan karya sastra, terutama pada bidang yang selama ini “dianggap jauh” dari fungsi sebuah karya. Masyarakat cenderung memandang karya sastra hanya sebagai asupan pengisi waktu luang dan ungkapan ekspresional semata. Padahal seharusnya karya sastra merupakan media yang dapat bermanfaat baik bagi personal (pribadi) maupun bagi komunal (masyarakat). Salah satu dari manfaat tersebut adalah karya sastra merupakan sarana pengungkapan kebenaran, terutama apabila sebuah “narasi kebenaran” hanya dibuat dan dimiliki oleh satu pihak saja.

Pernyataan awal yang dibangun sebagai kerangka pijak adalah novel terpilih yaitu: Tanah Surga Merah [selanjutnya disebut TSM]. Dasar pemilihan tersebut kemudian diperkuat temuan bahwa ketiga novel di atas diikat oleh sebuah narasi tentang konflik yang membawa nama agama. Guna mengetahui hal tersebut maka perlu dijabarkan keterangan mengenai novel TSG.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian teks (wacana) sastra berwujud novel. Penggunaan corak perspektif penelitian sastra sosiologis dipilih karena dua hal (1) sastra merupakan sebuah cermin proses sosial ekonomi; (2) teks sastra sebagai bahan penelitian yang diarahkan untuk menguraikan strukturnya dan digunakan untuk memahami gejala sosial (Darmono, 2002:2-3; Endraswara, 2011:95).

Sumber data tulisan adalah novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur. Data berupa teks dalam novel yang berkaitan dengan (1) kondisi sosial budaya, (2) pelaku dan penyebab konflik dan (2) proses rekonsiliasi. Sumber data dibaca secara intensif, dikodifikasi, diklasifikasi, dan dianalisis kemudian diinterpretasi.

Pengumpulan data penelitian dari sumber data dilakukan dengan mengarah pada dua fokus penelitian berupa (1) kutipan-kutipan novel yang menggambarkan kondisi sosial masyarakat, (2) kutipan-kutipan novel yang menggambarkan rekonsiliasi konflik sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Novel TSM merupakan novel yang ditulis oleh Arafat Nur dan terbit pada tahun 2017. Arafat Nur adalah penulis kelahiran Aceh yang seringkali mengangkat tema tentang kehidupan masyarakat Nangroe Aceh Darussalam, baik ketika konflik RI dengan GAM, atau setelah konflik tersebut selesai.

Konflik politik Aceh (NAD) bukan sekadar latar novel TSM, tetapi juga inti cerita. TSM menceritakan kehidupan seorang mantan *kombatan* tentara Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Novel ini mencoba melihat benturan kepentingan yang terjadi di Aceh pra dan pasca perjanjian damai Helsinki. Benturan itu tidak hanya terjadi secara vertikal antara *apparatus hegemonic* (pemerintah) dengan GAM, tetapi juga konflik horizontal antar mantan kombatan GAM. Novel TSM mengungkap benturan-benturan kepentingan dan karakter, dengan amunisi konflik politik lokal, bukan hanya membuat naskah ini sebagai naskah novel politis tetapi juga memberi humor yang baik (Dewan Juri Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta 2016).

Ungkapan Dewan Juri pada paragraf di atas merupakan tulisan singkat yang mampu menggambarkan dengan tepat isi dari novel TSM. Novel ini tidak hanya berkisah seputar kehidupan seorang mantan “kombatan” Gerakan Aceh Merdeka (GAM) semata, tetapi juga menghadirkan beragam narasi seputar konflik di serambi Mekah yang sudah dimulai sejak medio 1960an.

Konflik Aceh merupakan konflik panjang antara Pemerintah Indonesia dengan “Sebagian” masyarakat Aceh yang menghendaki kemerdekaan. Konflik ini terbagi menjadi dua masa yang berbeda dengan tujuan dan bentuk yang berbeda. Konflik Aceh yang pertama dimulai dengan terbentuknya Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang dipada tahun 1953, yang dipimpin oleh Teungku Daud Beureueh seorang ulama kharismatik Aceh. Ketegangan semakin meruncing ketika Teungku Daud Beureueh menderklasikan bahwa Aceh merupakan bagian dari Darul Islam (DI), dan melakukan bai’at pada Imam Daulah Islamiah (DI) yaitu Kartosoewirdjo (Tempo, 2011:5; Gunawan, 2000:53; van Dijk,1983:79). DI/TII Aceh ini berakhir pada tahun 1962, dengan “turun gunungnya” Teungku Daud Beureueh, kembali ke pangkuan Indonesia.

Konflik kedua Aceh terjadi tahun 1973-2005. Konflik ini dimulai Ketika para mantan pasukan DI/TII melakukan konsolidasi dan memutuskan untuk menghidupkan cita-cita Daulah Islamiah yang sempat terhenti dengan ditangkapnya Imam Kartosoewirdjo pada tahun 1962. Pada peristiwa kedua ini terjadi peralihan orientasi Gerakan, karena terjadi perbedaan pendapat antara Daud Beureueh dengan salah satu orang kepercayaannya yaitu Hasan Tiro. Daud Beureueh bersikeras ingin menidirikan Negara Indonesia yang bersyariat Islam, sedangkan Hasan Tiro menginginkan kemerdekaan Aceh dengan mendirikan organisasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Solahudin, 2011:102).

Konflik kedua ini merupakan salah satu konflik terlama dalam sejarah negara Indonesia. Pertentangan senjata ini berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia. Nezar Patria pada unggahan sosial medianya (Facebook, 2020) mengingat momen penandatanganan perjanjian ini dengan sebuah catatan Panjang, yang di antaranya adalah sebagai berikut.

Perdamaian itu telah menjadi batu uji sejarah tentang makna kemerdekaan Republik Indonesia sendiri, yang diperjuangkan oleh rakyat Aceh bersama seluruh kekuatan anti kolonialisme di zaman perang kemerdekaan 1945-1949. Perdamaian Aceh adalah semacam "sertifikat" bahwa ada jalan lain selain berperang antar anak bangsa demi mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Catatan lembaga HAM internasional menyebutkan nyaris 20.000 orang tewas dalam konflik berdarah sejak 1976 ini, dan saya kira angkanya mungkin lebih besar lagi saat sejumlah operasi militer digelar.

Perdamaian ini adalah upaya rezim reformasi sejak masa Gus Dur sampai SBY, dan proses pasang surutnya saat itu cukup menegangkan. Ada pro kontra di Aceh dan Jakarta tentu saja, termasuk penentangan ide perdamaian dari sejumlah elit politik. Kita tahu akhirnya semua pihak menerima perdamaian itu, dan dia telah menjadi komitmen nasional dalam bentuk Undang-undang Pemerintahan Aceh."

Sebagaimana diungkapkan oleh Nezar Patria di atas, upaya untuk mengakhiri konflik Aceh merupakan upaya yang telah lama dicangankan oleh beberapa Presiden RI pasca Reformasi. Upaya ini telah dilakukan oleh presiden keempat RI yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan baru terwujud pada masa kepemimpinan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Tonggak perdamaian Aceh adalah lahirnya kesepakatan Helsinki Finlandia.

Salah satu kesepakatan pada butir MoU Helsinki, adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diharuskan untuk membubarkan 3000 pasukannya dan menyerahkan minimal 840 pucuk senjata. Begitu juga dengan pihak TNI/POLRI harus menarik pasukannya dari Aceh. Kegiatan tersebut efektif karena kesediaan kedua pihak untuk tunduk pada mekanisme pengaturan dan pengawasan oleh *Aceh Monitoring Mission* (AMM), sebuah lembaga yang dibentuk Uni Eropa dan Negara-Negara ASEAN untuk memantau perjanjian damai di Aceh. Proses penyerahan senjata oleh GAM dilakukan dalam empat tahap, dimulai sejak 15 September sampai 15 Desember 2005. Begitu juga dengan penarikan pasukan non-organik dilakukan bersamaan dengan pelucutan senjata. Totalnya, sebanyak 840 pucuk senjata GAM telah dihancurkan dan 31.681 pasukan non-organik TNI/POLRI telah ditarik dari Aceh (Anto dan Pemilianna Pardede, 2007:13). Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut.

STATISTIK PELUCUTAN SENJATA GAM (Diperbarui 20 Desember)					
Tahap	Diserahkan GAM	Diskualifikasi	Diterima	Dipermasalahan Pemerintah Indonesia	Jumlah Senjata yang Tidak Dipermasalahan
I (September 2005)	279	36	243	17	226
II (Oktober 2005)	291	58	233	35	198
III (November 2005)	286	64	222	15	207
IV (Desember 2005)	162	20	142	4	138
TOTAL	1.018	178	840	71	769

Sumber: Anto, J dan Pemilianna Pardede (Ed). 2007. *Meretas Jurnalisme Damai di Aceh*. Jakarta: Kippas.

STATISTIK PENARIKAN PASUKAN NON-ORGANIK TNI/POLRI (Diperbarui 13 Januari)			
Periode	TNI	POLRI	Total
I (September 2005)	6.671	1.300	7.971
II (Oktober 2005)	6.097	1.050	7.147
III (November 2005)	5.596	1.350	6.964
IV (Desember 2005)	7.628	2.150	9.778
TOTAL	25.890	5.791	31.681

Sumber: Anto, J dan Pemilianna Pardede (Ed). 2007. *Meretas Jurnalisme Damai di Aceh*. Jakarta: Kippas.

Di saat yang bersamaan muncul polemik yang mempersoalkan jumlah senjata GAM yang sesungguhnya dalam rapat tertutup antara Badan Intelijen Negara (BIN) dan Komisi I DPR di Jakarta. Mereka meyakini bahwa jumlah senjata GAM sebanyak 1.680 atau dua kali lipat dari jumlah yang disebutkan di butir perjanjian. Senjata-senjata yang masih berada di tangan masyarakat sipil biasanya disembunyikan di bawah tanah di hutan. (Acehkitacom, 2018).

Apa yang ditakutkan oleh BIN ternyata benar adanya. novel TSM mengungkap bagaimana senjata yang tidak diserahkan pada perjanjian damai dahulu, sebagaimana kutipan berikut.

(1) Aku yang telah lama menahan diri mulai membawa lagi sepucuk pistol tua lama buatan Belgia yang tidak ikut kuserahkan saat terjadi kesepakatan damai dengan pemerintah dulu (Nur, 2016:25).

(2) Aku yakin Dun Mimi membelot dari Partai Merah bukan karena melanjutkan perjuangan yang belum tuntas, melainkan karena tidak puas dengan pemerintah sekarang. Dia angkat senjata lagi karena tidak diperhatikan pemerintah, tidak sebagaimana teman-teman kita yang sudah mengendalikan kekuasaan (Nur, 2016:53).

Pada saat penyerahan senjata kepada AMM pada 2005 lalu banyak kombatan GAM tidak menyerahkannya karena masih takut dan tidak percaya. “Kombatan” adalah istilah yang sering digunakan untuk menunjuk pasukan GAM yang sedang melakukan gerilya. Tujuh tahun kemudian, yakni pada tahun 2012 terkumpul 973 pucuk senjata yang diserahkan warga secara sukarela (Serambinews.com, 2012). Bahkan pada tahun 2019 Kodam Iskandar Muda berhasil mengumpulkan 174 pucuk senjata dan 7.332 butir muhandak (Inews.id, 2019).

Kuasa dan Celaka

Salah satu butir perjanjian Helsinki yang menyebutkan bahwa, rakyat Aceh berhak untuk membentuk partai-partai politik lokal yang memenuhi persyaratan nasional. Butir kesepakatan ini membuat rakyat Aceh memiliki hak untuk memilih dan menentukan pejabat-pejabat yang menduduki posisi eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan Aceh. Pasca perjanjian tersebut, Masyarakat Aceh telah menggelar beberapa kali pemilihan umum yakni PILKADA 2006 dan 2012, dan Pemilu legislatif tahun 2009. Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada para mantan kombatan GAM untuk membentuk partai politik local Aceh. Pembentukan partai lokal ini pada kenyataannya malah membuat tensi politik di Aceh meningkat. Pada tahun-tahun pemilu tersebut marak dijumpai berbagai tindak kekerasan. Begitu juga dengan pemilihan umum legislatif 2014 yang kerap diwarnai tindak kekerasan, intimidasi, teror dan pembunuhan (*Police Brief Aceh Election*, 2014:1). Novel TSM dengan jelas menggambarkan tindak kekerasan tersebut seperti pada kutipan berikut.

- (1) Minggu, 9 Februari 2014, tepat ketika dua bulan lagi hendak dilaksanakannya pemilihan umum dewan, aku tiba kembali di Aceh setelah lima tahun lebih hidup dalam pelarian (Nur, 2016:7).
- (2) Bahkan mereka yakin, selain Sofyan dan Wandu, lahirnya Partai Jingga adalah gagasanmu (Nur, 2016:57).
- (3) Sepertinya ini bakalan menjadi sejarah pertama pencekalan yang terjadi terhadap pertunjukan drama di Aceh (Nur, 2016:110).

Kutipan di atas merupakan gambaran dari kehidupan Murad, eks kombatan GAM yang kembali di Aceh setelah lima tahun bersembunyi. Murad menjadi buronan Partai Merah karena dituduh membunuh anggota dewan dan tokoh penting Partai Merah, serta menjadi dalang dibalik berdirinya Partai Jingga. Partai Merah yang diungkapkan pada novel TSM sangat mirip identitasnya dengan Partai Aceh dan sedangkan Partai Jingga merupakan gambaran dari Partai Nasional Aceh. Keduanya merupakan dua partai lokal paling berkuasa di Aceh, yang kerap berselisih paham bahkan tak jarang terlibat dalam tindak kekerasan. Sebut saja 26 kasus kekerasan pemilu di kabupaten Aceh Utara, dengan rincian 16 kasus yang dilakukan oleh OTK, 8 kasus oleh partai lokal (4 kasus oleh PA dan 4 kasus oleh PNA) dan 1 kasus oleh Caleg PA serta 1 kasus oleh Caleg Partai Nasional Aceh.

- (1) Sebetulnya, pemilihan kepala daerah yang berlangsung April 2012 lalu, kepercayaan rakyat terhadap Partai Merah sudah jauh menurun (Nur, 2016:61).
- (2) Lantas pembicaraan pun beralih pada soal situasi politik sekarang, mengenai kerusuhan yang mulai muncul di sana-sini menjelang pemilihan umum yang akan berlangsung April mendatang (Nur, 2016:173).

Beberapa kutipan di atas merupakan gambaran yang terjadi PILKADA Aceh. Pemilihan legislatif atau Kepala daerah kerap kali melahirkan berbagai tindak kekerasan dan terus terjadi secara berulang-ulang. Rangkaian kekerasan tersebut mulai dari intimidasi, pembakaran, penembakan, pengrusakan, penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan yang membabi buta dan kejam. Rangkaian kekerasan menjelang pemilu tidak hanya terjadi di satu tempat tetapi menyebar ke berbagai daerah di wilayah Aceh. Kasus paling dominan adalah intimidasi dan kampanye hitam. Kasus terbanyak terkait intimidasi dan kampanye hitam terjadi di Aceh Utara yang mencapai 22 kasus dan Banda Aceh yang umumnya berbentuk kampanye hitam sebanyak 20 kasus (*Police Brief Aceh election*, 2014:5-7).

Secara keseluruhan, ada sepuluh partai lokal yang didirikan di Aceh, pasca perjanjian damai. Dari sepuluh partai tersebut tetapi hanya enam yang memenuhi kriteria dalam pemilihan legislatif tahun 2009. Enam partai yang lolos kriteria adalah Partai Aceh (PA), Partai SIRA (Suara Independen Rakyat), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), dan Partai Daulat Aceh (Missbach, 2012:265). Partai Aceh adalah partai paling berkuasa di Aceh. Mereka menduduki tempat-tempat penting terhormat di pemerintahan, baik sebagai kepala pemerintah, pejabat dan anggota Dewan. Dulunya partai ini bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka (Partai GAM), kemudian pernah berubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM). Dalam pemilu 2009, Partai Aceh meraih suara mayoritas di provinsi Aceh dengan menguasai 47% kursi yang tersedia. Partai ini sendiri dipimpin oleh *elite-elite* GAM seperti Muzakir Manaf (Panglima Gerakan Aceh Merdeka), Kamaruddin Abubakar (Wakil Panglima GAM), Sarjani Abdullah (Panglima GAM di Pidie) dan Darwis Jeunieb (Panglima Gam di Batee Lliek) (Aceh Tribunnews, 2019).

Banyaknya partai lokal yang harus “bertarung” pada proses politik membuat gesekan antar partai kerap kali terjadi. Arafat Nur menggambarkan “gesekan-gesekan” tersebut dalam novel TSM. Eskalasi “gesekan” tersebut semakin meningkat terutama menjelang pemilu. Gesekan antar partai tersebut disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah atau pelanggaran kampanye seperti kutipan berikut;

- (1) Dua calon dewan partai jingga di sini kerap mendapatkan tekanan dan ancaman (Nur, 2016:136)
- (2) Disebutkan di situ bahwa Murad si penjahat mulai melakukan aksi penyerangan terhadap kantor cabang Partai Merah yang ada di beberapa kecamatan (Nur, 2016:150)
- (3) Lantas pembicaraan pun beralih pada soal situasi politik sekarang, mengenai kerusuhan yang mulai muncul di sana-sini menjelang pemilihan umum, yang akan berlangsung serentak di Aceh, April mendatang (Nur, 2016:173)
- (4) Yang terjadi di luar sana orang-orang Partai Merah dan orang-orang Partai Jingga saling menuding (Nur, 2016:178)

Kutipan 1 dan 2 memperlihatkan bagaimana konflik dan pelanggaran kampanye di Aceh khususnya menjelang Pemilu 2014. Berbagai ancaman dan tindak kekerasan terjadi kepada Partai Jingga (Partai Nasional Aceh) yang merupakan lawan dari Partai Merah (Partai Aceh). Seperti yang diungkapkan oleh Karo Penmas Polri Brigjen pol Boy Rafli Amar (Merdeka.com, 12/11/2019) bahwa mendekati pemilu, Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh sering bersaing dengan cara kekerasan. Kedua partai tersebut akan saling menuding dan menuduh siapa pelakunya.

Sedangkan kutipan (3 dan 4) memperlihatkan kerusuhan menjelang pemilu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dan *Aceh Institute*, mengungkapkan bahwa terjadi 37 pelanggaran pemilu di Aceh. Beberapa kasus kekerasan yang terkemuka yaitu (1) kasus penembakan yang menewaskan Faisal, seorang Caleg dari PNA Aceh Selatan. Faisal diberondong peluru ketika mengendarai mobil dalam perjalanan pulang ke rumahnya, (2) pelemparan peledak ke kantor Partai Aceh Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, (3) Pembakaran posko Partai Gerindra di Pidie, (4) Penembakan posko PNA di Aceh Barat Daya, dan (5) pembakaran posko Partai Aceh di sungai Paoh, Kota Langsa. Adapun Target korban kekerasan politik sendiri yaitu 52% adalah pengurus atau Caleg, 44% tim sukses dan 4% masyarakat pemilih. Sedangkan waktu kejadiannya sendiri itu paling banyak terjadi antara pukul 00:00 sampai 06:59 yaitu sebanyak 21 kejadian. Untuk pelakunya sendiri yang paling dominan adalah OTK (orang tak dikenal). Kabupaten Aceh Utara menempati rangking tertinggi dalam hal kekerasan pemilu yaitu terdapat 26 kasus, terdiri dari 16 kekerasan oleh OTK, 8 kasus

oleh pendukung partai lokal (4 kasus oleh PA dan 4 kasus oleh PNA) (*Policy Brief Aceh Election, 2014: 1-4*).

Dalam novel ini juga disebutkan bagaimana partai lain sulit untuk bergerak, seperti pada kutipan berikut;

Bagaimana pun juga Partai Merah sangat berkuasa saat ini dengan pengikut dan pendukungnya dari kota sampai pelosok. Partai terkaya, dan orang-orangnya menduduki jabatan penting di pemerintahan; apa yang bisa dilakukan partai lain? Mereka menguasai dan mengendalikan kekuasaan begitu besar, tanpa memberikan ruang sedikit pun bagi partai lain untuk bergerak (Nur, 2016: 136)

Partai Jingga mendapat tekanan hebat di mana-mana sehingga pengurus dan pendukungnya tidak berani menunjukkan diri terang-terangan di depan khalayak. Begitu juga partai nasional yang bukan koalisi Partai Merah; mereka semua tidak berkutik (Nur, 2016:135)

Kutipan di atas memperlihatkan bagaimana partai lain selain Partai Merah sulit untuk bergerak sekalipun itu adalah Partai Jingga. Kampanye hitam, intimidasi, tindak kekerasan dan teror yang dilakukan oleh Partai Merah (Partai Aceh) membuat hak kebebasan pilihan politik di Aceh terancam. Beberapa partai politik nasional (seperti PKB, PBB, PKS, Partai Nasdem, PPP dan partai lainnya) cenderung tidak menggunakan kampanye terbuka untuk menghimpun masyarakat. Karena ketakutan masyarakat dengan ancaman, peringatan dan pemantauan dari pihak yang membahayakan (*Policy Brief Aceh Election, 2014:1-4*).

KESIMPULAN

Tulisan sederhana terhadap novel *Tanah Surga Merah* ini menghasilkan sebuah temuan yang menarik yaitu konflik yang terjadi di Negeri Serambi Mekah ini tidak hanya didasarkan oleh kepentingan politik saja, tetapi juga diiringi dengan beragam motif (ekonomi, sosial, dll). Temuan yang lain adalah bagaimana Arafat Nur, sebagai pengarang, mencoba untuk mengangkat sudut konflik yang lain, yaitu konflik antara mantan kombatan, serta konflik antar peserta pemilu di Aceh.

Dalam konteks rekonsiliasi, data dalam novel yang telah dikaji dapat dijadikan sebagai jembatan narasi konflik. Jembatan naratif ini dapat digunakan sebagai bahan kajian, terutama bagi generasi pembaca sejarah yang rata-rata bukan pelaku sejarah. Dengan kemunculan ragam pandangan tersebut, maka kebenaran akan sebuah konflik dapat dilihat dari beragam sudut pandang pelaku konflik. Dari sini, diharapkan para pembaca sejarah dapat mengambil sebuah narasi yang melihat konflik dari beragam sudut pandang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diucapkan untuk jajaran pimpinan Fakultas Ilmu Budaya yang mengalokasikan dana penelitian yang menjadi dasar artikel ini. Ucapan terima kasih juga dihatorkan kepada mas Alpi Anwar Pulungan atas bantuannya dalam mencari data dan informasi terkait Aceh dan GAM.

RUJUKAN

- Alif, Afthonul. 2015. *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice. Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Alwi, Hasan, dkk. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga. Jakarta: Penerbit Gramedia dan Pusat Bahasa

- Anto, J dan Pemilianna Pardede (Ed). 2007. *Meretas Jurnalisme Damai di Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Arafat Nur, 2014. Twitter, diakses pada 14 September 2020. https://twitter.com/arafat_nur/status/456585483829518336?s=08
- Van Dijk, Cornelis. 1983. *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafiti
- Eagleton, Terry. 2010. *Teori Sastra Sebuah Pengantar Komprehensif* (Terjemahan Harfiah Widiawati, dkk). Yogyakarta: Jalasutra.
- Endraswara, Suwardi. 2011. *Metodologi Penelitian Sosiologi Sastra*. Jakarta: Buku Seru.
- Eskarpit, Robert. 1958. *Sosiologi Sastra* (Terjemahan Ida Sundari Husen, 2008). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fasya, Teuku Kemal. 2011. *Realitas Konflik yang Terpilin-Pilin*, diakses pada 15 September 2020. https://issuu.com/koran_jakarta/docs/edisi_1101_-_22_juli_2011
- Hasan, Nurdin. 2015. *Din Minimi dan 120 Anak Buahnya Menyerahkan Diri*, diakses pada 14 September 2020. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/din-minimi-menyerahkan-diri-12292015104044.html>
- Indrawan, Angga. 2016. *70 Anggota Din Minimi Terima Amnesti*, diakses pada 17 September 2020. <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/07/21/oanyrj365-70-anggota-din-minimi-terima-amnesti>
- iNews.id. 2019. *KSAD Apresiasi Kodam IM & Masyarakat Aceh Soal Penyerahan Senjata Sisa Konflik*, diakses pada 14 September 2020. <https://www.inews.id/news/nasional/ksad-apresiasi-kodam-im-masyarakat-aceh-soal-penyerahan-senjata-sisa-konflik>
- Jones, Adam. 2006. *Genocide a Comprehensive Introduction*. New York: Routledge
- Junus, Umar. 1986. *Sosiologi Sastera Persoalan Teori dan Metode*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
- KIP Aceh, 2016. *Data Fakta Pilkada Aceh 2006 dan 2012*, diakses pada 16 September 2020. <https://kip.acehprov.go.id/data-fakta-pilkada-aceh-2006-dan-2012/>
- Kompas, 20 November 2014. Todung Mulya Lubis. *Luka Kemanusiaan yang Belum Sembuh*.
- Luxemburg, Jan van, dkk. 1989. *Pengantar Ilmu Sastra* (Terjemahan Dick Hartoko). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Merdeka.com. 2014. *Polisi Sebut Partai Lokal Aceh Masih Sering Bersaing Gunakan Kekerasan*, diakses pada 18 September 2020. <https://www.merdeka.com/politik/polisi-sebut-partai-lokal-aceh-masih-bersaing-gunakan-kekerasan.html>
- Missbach, Antje. 2012. *Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh: Suatu Gambaran tentang Konflik Separatis di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Nur, Arafat. 2016. *Tanah Surga Merah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Razali, Habil. 2018. *Kilas Balik Helsinki: Selamat Tinggal Istri Kedua*, diakses pada 15 September 2020. <https://acehkita.com/kilas-balik-helsinki-selamat-tinggal-istri-kedua/>
- Renaldi, Aldi. 2017. *Ada Kemungkinan Senjata Bekas GAM Kini dikuasai Sindikat Narkoba*, diakses pada 17 September 2020. https://www.vice.com/id_id/article/8x4p7z/ada-kemungkinan-senjata-bekas-gam-kini-dikuasai-sindiket-narkoba
- Serambinews.com. 2017. *PNA Akan Jadi Partai Nanggroe Aceh*, diakses pada 17 September 2020. <https://aceh.tribunnews.com/2017/05/10/pna-akan-jadi-partai-nanggroe-aceh>
- Setyadi, Agus. 2015. *Ini Din Minimi, Pimpinan Kelompok Bersenjata Paling Dicari dan Akhirnya Menyerah*, diakses pada 16 September 2020. <https://news.detik.com/berita/d-3106388/ini-din-minimi-pimpinan-kelompok-bersenjata-paling-dicari-dan-akhirnya-menyerah>
- Sumardjo, Jacob. 1983. *Pengantar Novel Indonesia*. Jakarta: PT. Karya Unipress
- Teeuw, A. 1988. *Sastra dan Ilmu Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya

- Tempo.co. 2012. *Kubu Irwandi Daftarkan Partai Lokal Baru*, diakses pada 17 September 2020. <https://nasional.tempo.co/read/399333/kubu-irwandi-daftarkan-partai-lokal-baru>
- The Aceh Institute. *Aceh Election Policity Brief: Dominasi Kekerasan Dalam Pemilu di Aceh*, diakses pada 16 September 2020. <https://acehinstitute.org/publikasi/buku/dominasi-politik-kekerasan-dalam-pemilu-di-aceh.html>
- Tohari, Ahmad. 2014. *Proses menjadi Penulis/Pengarang*. Makalah (Tidak diterbitkan). Dipresentasikan dalam acara Bulan Bahasa FIB UB tanggal 29 Desember 2014
- Verdoleage, Annelies. 2008. *Reconciliation Discourse: the Case of the Truth and reconciliation commission*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins (ebook) *Publishing Company*
- Viva.co.id. 2010. *Penyerang Polsek di Sumut Kelompok Terlatih*, diakses pada 17 September 2020. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/178820-penyerang-polsek-adalah-orang-orang-terlatih>
- Wahid, Abdurahman. 1997. “Memahami Kaum Muda” dalam Zein, A. Helmi Faishal dan Nurhakim (ed). *Dinamika Kaum Muda IPNU dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Penerbit PP. IPNU
- Welleck, Rene dan Austin Warren. 1989. *Teori Kesusastraan* (Terjemahan Melani Budianta). Jakarta: PT. Gramedia
- Zoetmulder, P.J dan S.O. Robson. 2011. *Kamus Jawa Kuno Indonesia* (Terjemahan Darusuprta dan Sumarti Suprayitna). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.